

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA YANG
MENIMBULKAN KERUSAKAN BARANG
DI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
(Studi Kasus PT. Borneo Sanggau Permai di Kabupaten Sanggau).**

PUBLIKASI ILMIAH

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Ujian Tesis



DIAJUKAN OLEH

MARISON TOBER H. SIRAIT, S.Ik. A21210047

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PONTIANAK
2014**

PUBLIKASI ILMIAH

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA YANG MENIMBULKAN
KERUSAKAN BARANG
DI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
(Studi Kasus PT. Borneo Sanggau Permai di Kabupaten Sanggau)**

**OLEH :
Marison Tober H. Sirait, S.Ik.**

NIM. A21210047

**Pembimbing I : PROF. H. SLAMET RAHARDJO, SH
Pembimbing II : SAMPUR DONGAN SIMAMORA, SH., M.H.**

ABSTRACT

This thesis discusses the rule of law in the resolution of disputes arising out of overlapping land ownership certificate (case study in the district land office stronghold highway). This research was conducted using the method of the normative legal research, the conclusion of all the foregoing, it can be drawn a conclusion that: Factors that cause the occurrence of acts of vandalism stuff done by people (actors) in the PT. Borneo Sanggau Permai (PT. BKP) Sanggau is no dissatisfaction actors Because destruction of the vagueness of the company, as well as fatigue and felt aspirations articulated not heard and not ignored by the PT. Borneo Sanggau Permai (PT. BKP), provocation factor of certain people, the will of coercion factor, communication disagree, and interests tertentu. Upaya-efforts made by law enforcement to combat the destruction of facilities and goods belonging to the company PT. Borneo Sanggau Permai (PT. BKP) is done by people (actors) are, provide outreach to the community about the delivery of a good and true aspirations as Law No. 9 of 1998 on freedom of expression in public, for the public to know the background of the doing damage, Facilitate communities and local government the district, Finding out the root causes or conflicts between communities, Reconciling the parties involved in the protests or conflicts (fights), law enforcement should be run if there is a victim of vandalism or physical (mental). The advice in this study is that in the search for prevention efforts against criminal damage belongings enterprise conducted by the people around PT. Borneo Sanggau Permai (PT. BKP), the author suggested that performed a variety of other ways that can cope with the destruction of the goods at the time of the protests or conflicts between the communities of which the company's company party and pendekatan always communicate with the community so that what the public wants or condition of the people in the know by the company. So that the company knows how conditions and issues in the company and the company always involve the public in making decisions that result in decisions that produce can be accepted by society. So there is no disagreement between the company with local government and police masyarakat. Pihak be firm if there are companies and people who have been found guilty of the police and the courts, the police, local government and is entitled to the full extent of the sanctions in accordance with their respective tepoksinya so events like this do not happen again.

Keywords: Overview of Criminology Against Crime

Abstrak

Tesis ini membahas kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa atas timbulnya tumpang tindih sertifikat hak milik atas tanah (studi kasus di kantor pertanahan kabupaten kubu raya). Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan kesimpulan Dari semua uraian di atas maka dapat ditarik suatu kesimpulan yaitu: Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindakan perusakan barang-barang yang dilakukan oleh masyarakat (pelaku) di PT. Borneo Sanggau Permai (PT. BKP) Kabupaten Sanggau adalah Karena ada ketidakpuasan pelaku pengrusakan atas ketidakjelasan perusahaan, serta rasa lelah dan merasa aspirasi yang disampaikan tidak didengar dan tidak dipedulikan oleh pihak PT. Borneo Sanggau Permai (PT. BKP) , Faktor provokasi dari orang-orang tertentu, Faktor pemaksaan kehendak, Komunikasi yang tidak sepaham , dan Kepentingan tertentu. Upaya-upaya yang dilakukan oleh penegak hukum untuk menanggulangi perusakan fasilitas dan barang-barang milik perusahaan PT. Borneo Sanggau Permai (PT. BKP) yang dilakukan oleh masyarakat (pelaku) adalah, Memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang penyampaian aspirasi yang baik dan benar sesuai undang-undang nomor 9 tahun 1998 tentang kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum, Mencari tahu latar belakang masyarakat dalam melakukan tindakan pengrusakan, Memfasilitasi masyarakat dengan pihak pemda kabupaten sanggau , Mencari tahu akar permasalahan atau konflik antar masyarakat, Mempertemukan pihak-pihak yang terlibat dalam aksi unjuk rasa atau konflik (perkelahian) , Penegakan hukum harus di jalankan jika terdapat perusakan atau korban fisik (jiwa). Adapun saran dalam penelitian ini adalah bahwa Dalam usaha mencari upaya-upaya penanggulangan terhadap tindak pidana perusakan barang-barang milik perusahaan yang dilakukan oleh masyarakat sekitar PT. Borneo Sanggau Permai (PT. BKP) , Penulis menyarankan agar dilakukan berbagai cara lain yang dapat menanggulangi perusakan barang-barang pada saat unjuk rasa atau konflik antara masyarakat an pihak perusahaan diantaranya Pihak perusahaan selalu melakukan komunikasi dan pendekatan dengan masyarakat sehingga apa yang diinginkan masyarakat atau kondisi masyarakat di ketahui oleh pihak perusahaan. Sehingga pihak perusahaan mengetahui bagaimana kondisi dan isu dalam perusahaan serta pihak perusahaan selalu melibatkan masyarakat dalam membuat keputusan sehingga hasil keputusan yang di hasilkan dapat diterima oleh masyarakat. Sehingga tidak terjadi ketidaksepahaman antara pihak perusahaan dengan masyarakat. Pihak Pemda dan kepolisian harus tegas jika ada perusahaan dan masyarakat yang telah dinyatakan bersalah dari pihak kepolisian dan pengadilan maka pihak pemda dan kepolisian berhak untuk memberikan sanksi yang seberat-berat sesuai dengan tepoksinya masing-masing sehingga kejadian yang seperti ini tidak terulang lagi.

Kata Kunci :Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana

Latar Belakang Penelitian

Tanah dalam arti hukum memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena dapat menentukan keberadaan dan kelangsungan hubungan dan

perbuatan hukum, baik dari segi individu maupun dampak bagi orang lain. Untuk mencegah masalah tanah tidak sampai menimbulkan konflik kepentingan dalam masyarakat, diperlukan pengaturan, penguasaan dan penggunaan tanah atau dengan kata lain disebut dengan hukum tanah¹.

Dalam pelaksanaan ketentuan tersebut maka diundangkanlah Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Dengan diundangkannya UUPA, berarti sejak saat itu Indonesia telah memiliki Hukum Agraria Nasional yang merupakan warisan kemerdekaan setelah pemerintahan kolonial Belanda².

Di dalam konsiderans Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria, menegaskan peranan kunci tanah, bahwa bumi, air dan ruang angkasa mempunyai fungsi yang amat penting untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur. Dalam konteks ini, penguasaan dan penghakkan atas tanah terutama tertuju pada perwujudan keadilan dan kemakmuran dalam pembangunan masyarakat.

Pengakuan eksistensi hak ulayat oleh UUPA merupakan hal yang wajar, karena hak ulayat beserta masyarakat hukum adat telah ada sebelum terbentuknya negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Pasal 3 UUPA menegaskan pengakuan tersebut dengan menyebutkan “dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2, pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak serupa itu dari masyarakatmasyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa, sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi³.

Tanah merupakan kebutuhan hidup manusia yang sangat mendasar. Manusia hidup dalam melakukan aktivitas diatas tanah sehingga setiap saat manusia selalu

¹K. Wantijk Saleh, *Hak Anda Atas Tanah*, Jakarta, Ghalia Indonesia 1982, hal. 7

²Sudjito, *Prona Pensertifikatan Tanah Secara Massal dan Penyelesaian Sengketa Tanah yang bersifat Strategis*, Yogyakarta, Liberty, 1987, hal. 1.

³Maria S.W Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan*, Jakarta, Kompas, 2001 Hal. 54.

berhubungan dengan tanah, dapat dikatakan hampir semua kegiatan hidup manusia baik secara langsung maupun tidak langsung selalu memerlukan tanah.

Tanah memiliki peran yang sangat penting artinya dalam kehidupan Bangsa Indonesia ataupun dalam pelaksanaan pembangunan nasional yang diselenggarakan sebagai upaya berkelanjutan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Pada saat manusia mati masih membutuhkan tanah untuk penguburannya sehingga begitu pentingnya tanah bagi kehidupan manusia, maka setiap orang akan selalu berusaha memiliki dan menguasainya. Dengan adanya hal tersebut maka dapat menimbulkan suatu sengketa di dalam masyarakat, sengketa tersebut timbul akibat adanya perjanjian antara dua pihak atau lebih yang salah satu melakukan perbuatan melawan hukum.

Penguasaan yuridis dilandasi hak dengan dilindungi oleh hukum dan umumnya memberi kewenangan kepada pemegang hak untuk menguasai secara fisik tanah yang dihaki. Penguasaan dalam arti yuridis adalah penguasaan yang beraspek perdata maupun publik.

Dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) diatur dan ditetapkan tata jenjang atau hierarki hak-hak penguasaan atas tanah dalam Hukum Tanah Nasional, yaitu :

1. Hak Bangsa Indonesia yang disebut dalam Pasal 1, sebagai hak penguasaan atas tanah yang tertinggi, beraspek perdata dan publik.
2. Hak Menguasai dari Negara yang disebut dalam Pasal 2, beraspek publik.
3. Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat yang disebut dalam Pasal 3, beraspek perdata dan publik.
4. Hak-hak perorangan/individual, semuanya beraspek perdata terdiri atas:
 - a. Hak-hak atas Tanah sebagai hak-hak individual yang semuanya secara langsung ataupun tidak langsung bersumber pada Hak Bangsa, yang disebut dalam Pasal 16 dan 53.
 - b. Wakaf, yaitu Hak Milik yang sudah diwakafkan dalam Pasal 49.
 - c. Hak Jaminan atas Tanah yang disebut "Hak Tanggungan" dalam Pasal 25, 33, 39, dan 51.

Ketentuan-ketentuan Hukum Tanah yang mengatur hak-hak penguasaan atas tanah sebagai lembaga hukum, antara lain memberi nama pada hak penguasaan yang bersangkutan; menetapkan isinya, yaitu mengatur apa saja yang boleh, wajib dan dilarang untuk diperbuat oleh pemegang haknya serta jangka waktu penguasaannya;

mengatur hal-hal mengenai subjeknya, siapa yang boleh menjadi pemegang haknya dan syarat-syarat penguasaannya; dan mengatur hal-hal mengenai tanahnya.

Tanah sebagai hak ekonomi setiap orang/badan hukum dapat memunculkan konflik maupun sengketa. Berbagai sengketa pertanahan itu telah mendatangkan berbagai dampak baik secara ekonomi, sosial dan lingkungan. Secara ekonomis sengketa itu telah memaksa pihak yang terlibat untuk mengeluarkan biaya yang dikeluarkan. Dalam hal ini dampak lanjutan yang potensial terjadi adalah penurunan produktivitas kerja tata usaha karena selama sengketa berlangsung, pihak-pihak yang terlibat harus mencurahkan tenaga dan pikirannya, serta meluangkan waktu secara khusus terhadap sengketa sehingga mengurangi hal yang sama terhadap kerja atau usahanya.

Dampak sosial dari konflik adalah dapat terjadinya ketidak harmonisan/kerenggangan sosial di antara warga masyarakat, termasuk hambatan bagi terciptanya kerjasama di antara mereka. Dalam hal ini konflik dapat terjadi dengan instansi pemerintah dan warga masyarakat di sekitar lokasi tanah sengketa, sehingga menimbulkan penurunan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah berkenaan ketidakpastian hukum.

Di samping itu, selama konflik berlangsung ruang atas suatu wilayah dan atas tanah yang menjadi objek konflik/sengketa biasanya berada dalam keadaan *status quo* sehingga ruang atas tanah yang bersangkutan tidak dapat dimanfaatkan akibatnya adalah terjadinya penurunan kualitas sumber daya lingkungan yang dapat merugikan kepentingan semua pihak.

Salah satu konflik pertanahan yang sering terjadi adalah sengketa lahan perkebunan kelapa sawit. Masalah yang sering muncul di perkebunan pertanahan/agraria dalam wujud sengketa pertanahan yang terakumulasi dalam tindakan anarkis, seperti penjarahan dan pendudukan tanah-tanah perkebunan, perusakan barang atau fasilitas perusahaan, dan lain sebagainya, yang dalam tataran hukum sangat bertentangan. Perilaku rakyat ini dicermati sebagai manifestasi dari sikap

protes ketidakadilan yang melampaui batas kesadaran mereka, tujuannya menuntut kembalinya hak-hak yang dirampas karena saluran hukum tersumbat. Dan tampaknya sengketa/konflik pertanahan ke depan justru mungkin akan meningkat intensitasnya, ditambah upaya penanganan penyelesaiannya memberikan kesan tidak komprehensif, tidak tuntas dan sifatnya partial atau sektoral.

Masih segar dalam ingatan kita sengketa lahan antara perkebunan kelapa sawit dengan warga di Desa Sungai Sodong, Mesuji, Ogan Komering Ilir, Sumatra Selatan, pada 21 April 2011 lalu, menewaskan sejumlah orang dalam sengketa berdarah itu. Sengketa lahan perkebunan kelapa sawit hampir terjadi di setiap daerah yang perkembangan perkebunan kelapa sawit semakin meluas dan sering mempergunakan/menduduki tanah milik masyarakat yang tidak dilakukan penyelesaian secara adil.

Tindakan anarkis sering terjadi terkait dengan sengketa lahan perkebunan kelapa sawit, salah satunya terjadi di lahan perkebunan kelapa sawit PT. Borneo Sanggau Permai di Kabupaten Sanggau. Adapun kronologis kejadian atau tindakan anarkis tersebut, yaitu: Pada hari Selasa tanggal 19 April 2011 sekitar jam 16.30 WIB, tersangka mengajak teman-temannya sejumlah kurang lebih belasan orang ke Kantor PT. Borneo Sanggau Permai di Dusun Sei Goa Desa Sungai Ilai Kecamatan Beduwei Kabupaten Sanggau, sambil membawa peralatan kerja untuk memanen buah kelapa sawit (Gancu, Parang, Engret, Dodos) ke Kantor PT. BKP tersebut, untuk menanyakan ke Kantor PT. BKP masalah paku yang dilindas kendaraan/mobil tersangka yang dipergunakan oleh kelompok tersangka dan kawan-kawannya untuk mengangkut buah kelapa sawit tersebut bocor, yang mana paku tersebut dicurigai tersangka sengaja dipasang oleh pihak perusahaan karena letaknya di belakang kantor PT. BKP. Setelah sampai di kantor PT. BKP tersangka bertemu dengan asisten lapangan, karena dari asisten lapangan dan seluruh staf PT. BKP tidak ada yang menjawab pembicaraan tersangka, kemudian dari situlah tersangka dan teman-temannya kesal terhadap pihak perusahaan lalu melakukan perusakan terhadap empat buah ban Jonder yang sedang parkir di

depan Kantor PT. BKP, dan melakukan pengrusakan pagar kantor PT. BKP yang dilakukan oleh tersangka dan teman-temannya, dengan menggunakan parang, gancu, dan kayu pagar yang terdapat paku, atas kejadian tersebut ban Jonder sebanyak empat buah rusak/bocor dan pagar kantor rusak. Pihak PT. BKP mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,-, terhadap ban Jonder dan kayu pagar yang rusak ditemukan di TKP yang kemudian diamankan ke Polsek Beduai untuk penyidikan lebih lanjut.

Tindakan perusakan yang terjadi dilakukan oleh tersangka itu sendiri merupakan tindak pidana, seperti diuraikan di atas sepintas hanya terkait dengan permasalahan yang kecil saja, namun jika dirunut dari awal maka tergambar bahwa kejadian tersebut juga terkait dengan keberadaan PT. BKP yang menurut masyarakat tidak mendatangkan dan meningkatkan kesejahteraan mereka, dan bahkan menjadikan lahan yang mereka usahakan sebelum adanya PT. BKP menjadi berkurang dan bahkan ada sebagian yang menjadi bagian dari lahan perkebunan PT. BKP.

Terlepas dari apapun alasannya, namun yang jelas bahwa tindakan anarkis yang dilakukan oleh tersangka bersama teman-temannya tersebut harus dilakukan penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan salah satu elemen dari konsep sistem hukum yang menurut Friedmen terdiri atas struktur, substansi dan budaya hukum⁴. Struktur hukum bersifat tetap yang terorganisasi ke dalam institusi penegakan hukum, seperti Pengadilan, Kejaksaan dan Kepolisian. Substansi adalah peraturan atau kaedah-kaedah hukum yang dipergunakan sebagai patokan berperilaku dan tata cara melakukan tindakan hukum oleh institusi penegak hukum dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran hukum, termasuk hukum yang hidup dalam masyarakat, atau bukan sebatas norma-norma yang ada dalam kitab undang-undang atau peraturan-peraturan tertulis. Budaya hukum ialah ide-ide, gagasan-gagasan, harapan-harapan dan pendapat umum tentang perilaku hukum dan tindakan penegakan hukum yang konstan bersesuaian dengan norma hukum baik tertulis maupun tidak tertulis.

⁴Soleman B. Taneko, *Pokok-Pokok Studi Hukum Dalam Masyarakat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hal. 27-28

Penegakkan hukum pidana terhadap masyarakat yang melakukan tindak Pidana dengan pengrusakan barang-barang di lahan perkebunan kelapa sawit seperti tersebut di atas didasarkan pada ketentuan Pasal 170 jo Pasal 56 KUHP. Hal ini perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya tindakan anarkis lainnya yang dapat berdampak lebih besar lagi.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini dalam bentuk penelitian tesis dengan judul: **TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA YANG MENIMBULKAN KERUSAKAN BARANG DI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT (Studi Kasus PT. Borneo Sanggau Permai di Kabupaten Sanggau).**

Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian di atas, maka dapat dikemukakan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana yang menimbulkan kerusakan barang dalam kasus sengketa lahan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Sanggau?
2. Upaya apa yang seharusnya dilakukan untuk menanggulangi terjadinya tindak pidana yang menimbulkan kerusakan barang dalam kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit pada masa yang akan datang

Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Yang Menimbulkan Kerusakan Barang Dalam Kasus Sengketa Lahan Perkebunan Kelapa Sawit Di Kabupaten Sanggau

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadi konflik I yang disertai dengan Perusakan barang milik perusahaan seperti yang terjadi di PT. Borneo Sanggau Permai (PT. BKP). Adapun kronologis kejadian atau tindakan anarkis tersebut, yaitu: Pada hari Selasa tanggal 19 April 2011 sekitar jam 16.30 WIB, tersangka mengajak teman-temannya sejumlah kurang lebih belasan orang ke Kantor PT. Borneo Sanggau

Permai (PT. BKP) di Dusun Sei Goa Desa Sungai Ilai Kecamatan Beduwai Kabupaten Sanggau, sambil membawa peralatan kerja untuk memanen buah kelapa sawit (Gancu, Parang, Engret, Dodos) ke Kantor PT. BKP tersebut, untuk menanyakan ke Kantor PT. BKP masalah paku yang dilindas kendaraan/mobil tersangka yang dipergunakan oleh kelompok tersangka dan kawan-kawannya untuk mengangkut buah kelapa sawit tersebut bocor, yang mana paku tersebut dicurigai tersangka sengaja dipasang oleh pihak perusahaan karena letaknya di belakang kantor PT. BKP. Setelah sampai di kantor PT. BKP tersangka bertemu dengan asisten lapangan, karena dari asisten lapangan dan seluruh staf PT. BKP tidak ada yang menjawab pembicaraan tersangka, kemudian dari situlah tersangka dan teman-temannya kesal terhadap pihak perusahaan lalu melakukan perusakan terhadap empat buah ban Jonder yang sedang parkir di depan Kantor PT. BKP, dan melakukan pengrusakan pagar kantor PT. BKP yang dilakukan oleh tersangka dan teman-temannya, dengan menggunakan parang, gancu, dan kayu pagar yang terdapat paku, atas kejadian tersebut ban Jonder sebanyak empat buah rusak/bocor dan pagar kantor rusak. Pihak PT. BKP mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,-, terhadap ban Jonder dan kayu pagar yang rusak ditemukan di TKP yang kemudian diamankan ke Polsek Beduai untuk penyidikan lebih lanjut. (kasus(hasil wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Sanggau).

Tindakan perusakan yang terjadi dilakukan oleh tersangka itu sendiri merupakan tindak pidana. Ternyata dari hasil penyelidikan Polres Sanggau perbuatan tersangka dan teman-temannya itu memang telah di rencanakan sejak lama, kekesalan tersangka dan teman-temannya timbul bukan hanya dari masalah bocornya Ban mobil milik pelaku saja, tetapi banyak faktor lain yang menyebabkan kemarahan pelaku dan teman-temannya antara lain :

1. Dalam melakukan ekspansi perkebunan, perusahaan perkebunan acapkali melakukan tindakan pelanggaran hak asasi manusia, dari mulai penyerobotan tanah-tanah milik masyarakat, kriminalisasi terhadap petani, hingga penindasan terhadap hak-hak buruh perkebunan.

2. Publik pun terus mengalami penurunan kualitas lingkungan hidup, akibat hadirnya perusahaan perkebunan. Pada umumnya, pembukaan perkebunan kelapa sawit, yang dikelola oleh perusahaan-perusahaan besar, tidak memenuhi standard Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Mayoritas AMDAL perusahaan perkebunan hanya menduplikasi dari wilayah perkebunan satu, ke perkebunan lainnya. Dalam operasionalnya, perusahaan perkebunan pun jarang sekali mentaati standar-standar lingkungan yang dipersyaratkan.
3. Tidak hanya kepada masyarakat, perusahaan perkebunan juga meluncurkan serangkaian intimidasi terhadap pekerja dan pegiat lingkungan, yang secara konsisten mendampingi petani korban kejahatan perusahaan perkebunan kelapa sawit.
4. Beranekamacam tindak intimidasi dan kekerasan tak jarang dialami oleh para pekerja dan pegiat lingkungan, ketika sedang melakukan kerja-kerja pendampingan dan pengorganisiran terhadap petani dan masyarakat di sekitar perkebunan, untuk mempertahankan hak-haknya dari jarahan perusahaan, dan buruh perkebunan, untuk menuntut haknya pada perusahaan.
5. Aparat pemerintah dan institusi hukum, yang seharusnya melindungi masyarakat, juga sering tidak peka terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat dan petani di sekitar wilayah perkebunan. Konflik pertanahan antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan, banyak yang ditindaklanjuti aparat dengan penangkapan dan penahanan, bahkan hingga pengajuan ke pengadilan. Ketimpangan dalam kepemilikan, dan sentralisasi pengelolaan sumberdaya alam, tidak pernah dilihat aparat negara sebagai latar belakang munculnya konflik.
6. Situasi demikian tentu sangat tidak menguntungkan bagi sebagian besar petani, masyarakat adat, buruh, dan masyarakat umumnya, ketika hak-hak hidup dan penghidupan mereka dirampas oleh perusahaan. Hak-hak mereka untuk mengembangkan diri, demi mencukupi kebutuhan dasar hidupnya, diinjak-injak oleh perusahaan. Tanah sebagai sarana utama penghidupan mereka, dijarah oleh

perusahaan perkebunan, dan sayangnya pemerintah senantiasa melegitimasi perilaku sewenang-wenang perusahaan terhadap petani.

7. Pemerintah berkuasa nampaknya kian jauh mengingkari tujuan awal didirikannya negara ini, yang salah satunya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan umum, sebagaimana termaktub dalam alinea ke-empat Pembukaan UUD 1945. Niat baik untuk meningkatkan pembangunan ekonomi ini tidak pernah diikuti dengan pengawasan yang memadai, terhadap praktik perusahaan perkebunan dalam mengelola usaha perkebunannya, yang seringkali melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan hak asasi manusia. (hasil Wawancara dengan LSM pemerhati Lingkungan)

Dari hasil wawancara dengan LSM di atas jelas menggambarkan ketidakberpihakan perusahaan atas Kepentingan Masyarakat sekitar Perkebunan. Hal-hal seperti ini yang memicu sering terjadinya konflik antara masyarakat dengan perusahaan, seperti yang terjadi pada PT. PT. Borneo Sanggau Permai (PT. BKP)

Perusakan fasilitas dan barang milik PT. PT. Borneo Sanggau Permai (PT. BKP) yang dilakukan oleh Pelaku dan teman-temannya pada saat konflik yaitu ketidakpuasan dari masyarakat atas perlakuan pihak PT. PT. Borneo Sanggau Permai (PT. BKP) atas masyarakat setempat, tidak sepadan antara masyarakat ataupun organisasi LSM, serta terdapat kepentingan tertentu dari orang tidak bertanggungjawab. Selain itu dari hasil angket ditemukan bahwa faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya perusakan barang-barang yang dilakukan oleh masyarakat adalah pada saat konflik itu terjadi di dalam area perusahaan yaitu adanya oknum-oknum tertentu yang memprovokasi, aspirasi pelaku pengrusakan yang tidak dipedulikan pihak perusahaan.

Hasil wawancara dan angket di atas yang menyangkut faktor-faktor penyebab terjadinya perusakan barang-barang yang dilakukan pelaku-pelaku pada saat konflik di dalam area perusahaan PT. Borneo Sanggau Permai (PT. BKP) dapat dibagi dalam beberapa bagian yaitu:

1. Faktor ketidakpuasan pelaku

Besarnya harapan akan penjelasan perusahaan serta rasa lelah dalam pelaku perusakan dan merasa aspirasi yang disampaikan tidak didengar dan tidak dipedulikan serta menyebabkan terjadinya perusakan barang-barang milik perusahaan dan bentrok dengan satpam perusahaan PT. Borneo Sanggau Permai (PT. BKP) bahkan dengan pihak kepolisian. Aspirasi yang tidak dipedulikan oleh pihak terkait membuat pelaku dan teman-temannya dan kesal sehingga mengambil jalan perusakan dan anarkis.

2. Faktor provokasi dari orang-orang tertentu

Sikap provokatif dari oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab yang sering menyusup di saat terjadinya konflik berpeluang besar menyebabkan terjadinya tindakan perusakan dan anarkis. Orang-orang yang tidak bertanggungjawab seperti ini tidak berasal dari kelompok mereka. Selain itu seringkali juga sifat provokatif ini berasal dari pihak yang datang seolah-olah ingin mendamaikan mereka. Tindakan berlebihan yang kadang dilakukan pihak keamanan (satpam) memancing emosi para pelaku-pelaku perusakan. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa sifat provokatif sering bermula pelaku yang tidak bertanggungjawab..

3. Faktor pemaksaan kehendak

Pemaksaan kehendak yang dimaksud di sini yaitu pelaku dan teman-temannya bertindak semaunya tanpa memperhatikan kepentingan lain. Contoh apabila pelaku meminta penjelasan yang berlangsung di depan kantor perusahaan semua pelaku dan teman-temannya berkeinginan masuk ke dalam kantor tersebut tanpa memperhatikan bahwa jumlah yang sangat banyak yang tentunya akan mengganggu apabila mereka semuanya masuk ke dalam kantor perusahaan tersebut. Tindakan seperti ini tentunya mendapatkan halangan dari pihak pengamanan kantor karena dianggap akan menimbulkan kekacauan. Akibat dari pemaksaan kehendak ini sangat berpotensi menimbulkan tindakan-tindakan yang melawan dengan norma-norma hukum. Pemaksaan kehendak ini terjadi karena yang menjadi kordinator lapangan

tidak berhasil melakukan control terhadap teman-temannya. Seandainya kordinator lapangan berhasil mengendalikan semua teman-temannya maka proses penyampaian aspirasi akan berjalan dengan lancar dan baik.

4. Faktor kepentingan tertentu.

Kepentingan tertentu maksudnya adalah aksi para pelaku di dalam area perusahaan itu juga dipengaruhi oleh kepentingan pribadi seseorang, kepentingan kelompok atau organisasi tertentu. Peserta aksi para pelaku dan teman-temannya di dalam area perusahaan merupakan korban dari kepentingan pribadi atau kepentingan organisasi yang tidak bertanggungjawab dengan memanfaatkan masyarakat dalam aksinya tersebut. Terdapat seseorang atau sekelompok orang yang sengaja membuat sedemikian rupa aksi para pelaku-pelaku di dalam area perusahaan yang mengakibatkan kerusakan fasilitas dan barang-barang milik perusahaan dengan tujuan mengambil keuntungan pribadi (hasil wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Sanggau).

Upaya-upaya yang dilakukan Untuk Menanggulangi Terjadinya Tindak Pidana Yang Menimbulkan Kerusakan Barang Dalam Kegiatan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Pada Masa Yang Akan Datang

Mengingat dalam aksi dan penyampaian aspirasi dan meminta penjelasan masalah dalam area perusahaan PT. Borneo Sanggau Permai (PT. BKP) sering kali terjadi kerusakan dan anarkis yang mengarah kepada kejahatan maka perlu ada solusi yang bisa menanggulangi terjadinya tindak kejahatan dalam proses tersebut. upaya-upaya penanggulangan terjadinya kerusakan barang-barang milik perusahaan yang dilakukan oleh pelaku dan masyarakat, baik itu sebelum terjadinya maupun setelah terjadinya kerusakan fasilitas dan barang pada saat terjadinya konflik di dalam area perusahaan adalah sebagai berikut :

1. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat dan para pelaku perusakan tentang penyampaian aspirasi yang baik dan benar sesuai undang-undang nomor 9 tahun 1998 tentang kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum.

Dalam praktik penyampaian aspirasi dan permintaan penjelasan dari pihak perusahaan ini, sikap saling menyalahkan sering muncul diantara masyarakat dengan pihak perusahaan bahkan pihak kepolisian. Hal ini terjadi karena tidak adanya komunikasi diantara para pihak. Sikap seperti ini akan selalu muncul apabila tidak ada usaha untuk mencari jalan keluarnya. Salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk menanggulangi hal tersebut adalah melakukan dialog antara masyarakat yang menyampaikan aspirasinya dengan pihak perusahaan Perkebunan kelapa sawit, khususnya PT. Borneo Sanggau Permai (PT. BKP) bahkan pihak kepolisian. Oleh karena itu perlu dilakukan sosialisasi dan penyuluhan hukum tentang unjuk rasa yang baik dan benar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dalam Pasal 6 Undang-Undang no.9 tahun 1998 tentang kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum ditentukan bahwa warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggungjawab untuk:

- a. Menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain;
- b. Menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum;
- c. Menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum;
- e. Menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.

Ketika masyarakat di sekitar perkebunan berunjuk rasa untuk menyampaikan tututannya melanggar aturan-aturan yang termuat dalam undang-undang tersebut, harus mendapat sanksi sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Segala sesuatu yang diatur dalam undang-undang tersebut harus ditaati oleh para masyarakat khususnya para pelaku pengrusakan. Apabila semua yang diatur dalam undang-undang tersebut ditaati dengan baik oleh

masyarakat maka tidak akan terjadi perusakan barang-barang atau bentrok dengan pihak keamanan perusahaan.

2. Mencari tahu latar belakang masyarakat (pelaku pengrusakan) dalam melakukan pengrusakan barang-barang milik perusahaan.

Ketika terjadi konflik dalam area perusahaan. Pihak perusahaan atau pihak birokrat (Dinas Kehutanan dan perkebuan) harus mengetahui latar belakang atau hal-hal yang mendasari masyarakat melakukan aksinya. Dengan demikian, masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya atau keinginannya dapat diterima atau ditanggapi oleh pihak perusahaan PT. Borneo Sanggau Permai (PT. BKP) dengan baik. Akibatnya masyarakat yang melakukan aksinya dan senang kemudian melakukan dialog dengan damai untuk mencari solusi dari permasalahan yang terjadi dan tidak melakukan perusakan dan anarkis.

3. Memfasilitasi masyarakat dengan pihak PT. Borneo Sanggau Permai (PT. BKP).

Pihak kepolisian berusaha menjadi fasilitator antara Pelaku-pelaku perusakan yang melakukan aksinya dengan pihak PT. Borneo Sanggau Permai (PT. BKP) atau antara masyarakat yang ikut serta dalam ujuk rasa di dalam area perusahaan . Pihak kepolisian dalam hal ini menjadi penengah dan membantu pengunjuk rasa untuk bertemu dengan pihak perusahaan PT. Borneo Sanggau Permai (PT. BKP). untuk menyampaikan aspirasinya sehingga para masyarakat merasa bahwa aksi yang dilakukannya tidak sia-sia dan tepat sasaran. Kemudian untuk aksi perusakan, pihak kepolisian berusaha menjadi pihak yang bisa menjadi penengah atau pihak yang tidak memihak di antara kedua pihak yang bertikai dan selanjutnya pihak kepolisian mempertemukan perwakilan kedua belah pihak dan duduk secara bersama untuk mencari akar permasalahan dan keinginan kedua belah pihak serta bagaimana usaha untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Dengan demikian aksi tawuran antara masyarakat dalam area perusahaan ini tidak terulang lagi yang mengakibatkan perusakan barang-barang milik perusahaan.

4. Mencari tahu akar permasalahan timbulnya unjuk rasa di perusahaan PT. Borneo Sanggau Permai (PT. BKP).

Mencari tahu akar permasalahan unjuk rasa atau konflik yang berujung pada pengrusakan barang milik perusahaan antara masyarakat maksudnya adalah pihak keamanan perusahaan ataupun pihak kepolisian mencari tahu akar permasalahan masyarakat yang melakukan unjuk rasa atau pengrusakan dalam area perusahaan sehingga pihak kepolisian mudah dalam mengungkap dan menyelesaikan masalah. Jika pihak keamanan ataupun pihak perusahaan mengetahui latar belakang masyarakat melakukan aksi unjuk rasa atau pengrusakan antara masyarakat, dampaknya perusahaan bisa dihentikan dan tidak terulang lagi di dalam area perusahaan yang mengakibatkan perusakan barang-barang milik perusahaan tersebut.

5. Mempertemukan pihak-pihak yang terlibat dalam aksi unjuk rasa atau yang berkonflik.

Berupaya mempertemukan pihak-pihak yang terlibat dalam aksi unjuk rasa atau yang berkonflik antara masyarakat dan perusahaan maksudnya pihak kepolisian berusaha mempertemukan masyarakat dengan pihak Perusahaan yang ikut berkonflik dengan duduk bersama untuk membicarakan tuntutan atau keinginan masyarakat dalam aksi unjuk rasa atau mempertemukan antara masyarakat atau perwakilan masyarakat yang ikut dalam aksi tawuran untuk membicarakan dan memecahkan akar permasalahan sehingga terjadi konflik antara masyarakat dan mencari cara atau jalan keluar dan penyelesaiannya sehingga tidak terjadi lagi konflik antara masyarakat dan perusahaan yang mengakibatkan perusakan barang-barang milik perusahaan.

6. Penegakan hukum harus dijalankan jika terdapat perusakan atau korban fisik (jiwa).

Jika terdapat kerusakan dan korban fisik atau jiwa maka penegakan hukum harus dijalankan sesuai undang-undang yang berlaku. Pihak kepolisian berhak memproses dan melakukan penyidikan kepada mahasiswa yang dinyatakan telah

melakukan tindak pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Hasil Wawancara dengan Kasat reskrim Polres Sanggau)

Berbagai upaya terus dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencari solusi dari permasalahan yang terjadi, salah satu upaya lainnya adalah dengan melibatkan instansi Pemerintah Daerah yang terkait yaitu Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sanggau, Adapun hasil wawancara yang saya lakukan dengan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sanggau adalah mengenai upaya penanggulangan yang dilakukan pihak pemerintah daerah mengenai aspirasi masyarakat adalah melalui 5 tahapan sebagai berikut:

1. Komunikasi

Pihak Pemda, Kepolisian dan DPRD Kabupaten Sanggau melakukan komunikasi dengan masyarakat yang telah diduga atau melakukan perusakan fasilitas perusahaan baik itu pada saat unjuk rasa atau konflik dengan memanggil untuk bertemu dengan masyarakat dan pihak perusahaan PT. Borneo Sanggau Permai (PT. BKP) untuk mengetahui apa latar belakang sehingga terjadi perusakan barang-barang milik perusahaan.

2. Regulasi

Pihak Pemda, Kepolisian dan DPRD akan menilai apakah pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat dan perusahaan tersebut masuk dalam kategori ringan, sedang dan berat. Sehingga pihak Pemda, Kepolisian dan DPRD sesuai dengan tepoksinya bisa memberikan sanksi sesuai apa yang dilakukan oleh masyarakat dan perusahaan tersebut.

3. Kanalisasi

Pihak Pemda sanggau memberikan solusi yang tidak melanggar peraturan, contohnya bagi perusahaan yang terbukti bersalah yang diduga melakukan pelanggaran akan dicabut izin usahanya sampai permasalahan ini tuntas.

4. Komitmen

Pihak perusahaan dan masyarakat yang telah melakukan pelanggaran sama-sama berkomitmen dan apabila kedua belah pihak melanggar komitmen maka pihak Pemda berhak memberikan teguran atau sanksi sesuai dengan kesepakatan yang berlaku.

5. Pemberian sanksi

Pihak Pihak Pemda, Kepolisian dan DPRD harus tegas dalam pemberian sanksi terhadap masyarakat yang telah terbukti melakukan perusakan barang-barang milik perusahaan, kalau memang itu pelanggaran berat pihak kepolisian berhak melakukan sanksi pidana, karena apabila tidak diberikan sanksi pidana juga di takutkan akan ada korban fisik atau jiwa.

Kesimpulan

Dari semua uraian di atas maka dapat ditarik suatu kesimpulan yaitu:

1. Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindakan perusakan barang-barang yang dilakukan oleh masyarakat (pelaku) di PT. Borneo Sanggau Permai (PT. BKP) Kabupaten Sanggau adalah Karena ada ketidakpuasan pelaku pengrusakan atas ketidakjelasan perusahaan, serta rasa lelah dan merasa aspirasi yang disampaikan tidak didengar dan tidak dipedulikan oleh pihak PT. Borneo Sanggau Permai (PT. BKP) , Faktor provokasi dari orang-orang tertentu, Faktor pemaksaan kehendak, Komunikasi yang tidak sepaham , dan Kepentingan tertentu.
2. Upaya-upaya yang dilakukan oleh penegak hukum untuk menanggulangi perusakan fasilitas dan barang-barang milik perusahaan PT. Borneo Sanggau Permai (PT. BKP) yang dilakukan oleh masyarakat (pelaku) adalah, Memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang penyampaian aspirasi yang baik dan benar sesuai undang-undang nomor 9 tahun 1998 tentang kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum, Mencari tahu latar belakang masyarakat dalam melakukan tindakan pengrusakan, Memfasilitasi masyarakat dengan pihak pemda kabupaten sanggau , Mencari tahu akar permasalahan atau konflik antar masyarakat, Mempertemukan

pihak-pihak yang terlibat dalam aksi unjuk rasa atau konflik (perkelahian) ,
Penegakan hukum harus di jalankan jika terdapat perusakan atau korban fisik (jiwa).